

PROPOSAL PENELITIAN DASAR

KLUSTER PENELITIAN KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU MADRASAH DAN GURU PAI
Studi Tentang Mutu dan Penataan Penyelenggaraan Pendidikan Calon Guru Di LPTK,
Ketersediaan, Kecukupan dan Kebutuhan Guru di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten



Universitas Islam Negeri
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Tim Peneliti :

Dr. Abdul Rozak, M.Si (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/Ketua)
Dr. Asep Nursobah (UIN Sunan Gunung Djati Bandung/Anggota)
Dr. Naf'an Tarihoran, M.Hum (UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten/Anggota)

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2017

DAFTAR ISI

Abstrak	i
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan Penelitian.....	12
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	13
C. Literature Review	15
E. Metodologi Penelitian.....	26
F. Hasil yang Diharapkan.....	27
Daftar Pustaka	30
Lampiran :	

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk a. Mendeskripsikan data profil dan ketersediaan mahasiswa calon guru yang sedang studi di LPTK PTKI negeri dan swasta di Jakarta, Jawa Barat dan Banten terkait dengan aspek-aspek sebagai berikut : jenis kelamin, latar belakang sosial ekonomi, asal daerah, program studi, persepsi tentang profesi guru, dan orientasi kerja setelah menyelesaikan studi sarjana; b. Menyajikan data profil dan ketersediaan guru madrasah (RA, MI, MTs dan MA) baik guru kelas maupun guru mata pelajaran yang berada di bawah pembinaan Kanwil Kementerian Agama Jakarta, Jawa Barat dan Banten berdasarkan kualifikasi akademik, status kepegawaian, jenis kelamin, umur, kepangkatan fungsional, sertifikasi profesi, kesesuaian bidang tugas, pemenuhan jumlah jam mengajar, rasio kecukupan guru dengan siswa; kinerja guru profesional dan keterlibatan guru dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB); c. Melakukan analisis proyeksi kebutuhan guru madrasah yang berada di bawah pembinaan Kantor Kanwil Kementerian Agama Jakarta, Jawa Barat dan Banten terkait dengan kebutuhan guru kelas RA dan MI, kebutuhan guru mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di madrasah (MI, MTs dan MA), analisis kebutuhan materi dan bidang diklat dalam rangka pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB), analisis kebutuhan untuk memenuhi tuntutan kompetensi dan pembelajaran abad 21. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif digunakan secara bersamaan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggabungkan jenis penelitian deskriptif, kebijakan, dan survei. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif, metode survey, metode analisis kebijakan dan metode eksploratif. Data primer diperoleh dari dokumen resmi, unsur pimpinan (Rektorat, Dekanat, dan Jurusan, Biro), para dosen, para mahasiswa dari perguruan tinggi sasaran penelitian, Kanwil Kementerian Agama Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Pusat Data Kementerian Agama Pusat. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, penyebaran angket/questioner, wawancara mendalam dengan *focus group discussion (FGD)* untuk memperoleh data dengan instrumen pedoman studi dokumentasi, daftar pertanyaan/ Pernyataan, pedoman wawancara dan rekaman foto. Data diolah dengan *microsoft excell*, *minitab 14* dan dengan metode *complete linkage* dan *jarak euclidean*. Data dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif, *content analysis* data, analisis kebijakan dengan *SWOT Analysis* dan analisis kinerja dengan menggunakan *balanced score card*. Hasil dari penelitian ini adanya data dan informasi terkait standar

Kata Kunci: Mutu LPTK, Analisis Ketersediaan, Kecukupan dan Kebutuhan Guru Madrasah dan Guru PAI

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan lahir dari keinginan masyarakat untuk memelihara dan mewariskan kebudayaan dan filsafat hidup masyarakat kepada generasi muda (Parkay, et.al., 2010: 40). Umat manusia sebagaimana dikemukakan oleh Omsein & Levine (1985) telah melewati perjalanan yang sangat panjang dalam mencipta, mengembangkan, dan mewariskan kebudayaan kepada generasi muda untuk menguasai muatan budaya yang diperlukan mereka dalam kehidupan yang baik di masyarakat (Ansyar, 2015: 3). Karena itu pendidikan menjadi wahana strategis dan efektif dalam transformasi nilai, pengetahuan dan keterampilan dalam menopang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Ide dasar pendidikan itu adalah kerja membangun manusia beradab supaya bisa *survive* melindungi diri terhadap alam serta mengatur hubungan antar-manusia (Freud, 2007: 55-56). Melalui pendidikan terjadi proses di mana suatu kompleksitas pengetahuan dan kecakapan (*capacities*) diteruskan kepada generasi selanjutnya. Setiap generasi baru pada gilirannya akan menggali dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru yang diperlukannya untuk merespon dan mengatasi tantangan yang tidak dikenal lewat pendidikan dalam menguasai pengetahuan dan kecakapan terdahulu.

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Ki Hajar Dewantoro menegaskan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin karakter), pikiran (intelekt), dan tubuh anak. Ketiganya tidak boleh dipisah-pisahkan, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak didik selaras dengan dunianya. Sejalan dengan pandangan di atas, pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab (Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Pendidikan merupakan sarana proses humanisasi, proses pemberdayaan, dan sosialisasi dalam kerangka pembangunan sumber

daya manusia yang kreatif, inovatif, kritis, berpengetahuan, berkepribadian, dan taat azas.

Pendidikan nasional merupakan entitas yang berperan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan. Sebagai proses pembudayaan, pendidikan nasional termasuk di dalamnya pendidikan tinggi dituntut untuk dapat mewujudkan subyek didik sebagai insan Indonesia yang berbudaya luhur, berakhlak mulia dan berkepribadian keindonesiaan, berkeadaban sebagai warga negara yang baik dan cerdas dalam merespon berbagai dinamika sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan sebagai proses pemberdayaan, pendidikan menjadi wahana pengembangan potensi peserta didik secara optimal berdasarkan minat, bakat dan beragam potensi kecerdasan (*multiple intelligence*), pembentukan sikap dan tata nilai yang baik dan positif, dan pengembangan *soft skills* sesuai dengan dinamika dan tantangan zaman. Karena itu proses pendidikan yang dilaksanakan oleh guru sebagai aktor utamanya harus mampu mengembangkan multi kecerdasan (*hard skills dan soft skills*) peserta didik secara optimal melalui pembelajaran yang transformatif, visioner, humanis, dan kontekstual yang didukung dengan budaya kerja dan budaya organisasi yang kondusif, kepemimpinan pendidikan yang transformatif dan demokratis, manajemen pendidikan yang visioner, berbasis mutu dan kinerja, serta mampu beradaptasi secara baik, cepat, dan tepat sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat, kemajuan IPTEKS dan perubahan lingkungan strategis dalam skala nasional, regional dan global.

Pembangunan pendidikan hanya akan memberikan kontribusi nyata dan positif terhadap pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, jika pendidikan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkarakter unggul, produktif, kreatif, inovatif, terampil, dan berdaya saing sejalan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat dalam skala nasional dan global atau dapat menjadi solusi bagi permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Ekspektasi masyarakat pada dunia pendidikan berkembang secara cepat. Pada saat pertama kali, masyarakat berharap pendidikan bisa memerankan dirinya sebagai *agent of education*. Saat ini, masyarakat berharap pendidikan tidak hanya dapat memerankan dirinya sebagai *agent of education* tetapi juga sebagai *agent of research and development*, sebagai *agent of knowledge and technology transfer* dan sebagai *agent of economic development* (Renstra Kemenristekdikti

2015-2019). Untuk dapat memenuhi harapan masyarakat tersebut, pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru sebagai ujung tombak dari proses pendidikan dapat dilaksanakan dan dikembangkan secara optimal, produktif dan bermakna dengan menerapkan ragam pendekatan, model, strategi, metode dan teknik pembelajaran yang dapat menghasilkan lulusan bermutu, berdaya saing dan memiliki kompetensi unggul sejalan dengan dinamika dan tuntutan kompetensi abad 21 atau masyarakat global. Abad 21 yang merupakan abad pengetahuan telah mendorong dunia pendidikan saat ini untuk berada dalam era pengetahuan (*knowledge age*) dengan cirinya adalah percepatan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang luar biasa cepatnya. Percepatan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi ini didukung oleh penerapan media dan teknologi digital yang disebut dengan *information super highway* (Gates, 1996). Masyarakat yang diwujudkan dengan fenomena itu sebagaimana dikemukakan oleh Drucker (1989) disebut sebagai masyarakat pengetahuan (*knowledge society*) yaitu masyarakat yang berbasis pada informasi dan memiliki kemampuan untuk mengakses dan mengolah informasi secara kreatif (Eric Wibisono, 1999: 72).

Berbagai fenomena yang menonjol dalam dunia pendidikan memasuki abad 21 ialah globalisasi pendidikan, budaya dan karakter bangsa, budaya internet dan *cyber society* (Mukminan, 2014: 3-4). Globalisasi pendidikan melahirkan "ekonomi pengetahuan" yaitu pertumbuhan ekonomi yang didasarkan dan bertumpu pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai produk dari adanya kebijakan investasi yang besar dalam bidang "*research and development*". Kegiatan ini melibatkan penelitian yang dilakukan perguruan tinggi ataupun lembaga penelitian (BNSP, 2010: 27). Pengembangan budaya dan karakter bangsa merupakan komitmen bangsa sejak awal kemerdekaan. Hal itu termuat dalam pembukaan UUD 1945, dan peraturan perundangan lainnya. Budaya internet dan *cyber society* yang berkembang pesat harus menjadi bagian penting dalam pendidikan. Memasuki abad 21, pendidikan menjadi semakin penting untuk menjamin lulusannya memiliki keterampilan belajar secara mandiri (*self learning*) dan berkelanjutan (*life long learning*), berinovasi, keterampilan menggunakan teknologi dan media informasi, serta dapat bekerja, dan bertahan dengan menggunakan kecakapan hidup (*life skills*). Ketiga keterampilan tersebut sejalan dengan konsep pendidikan abad 21 sebagaimana

dikemukakan oleh para pakar (*21st Century Skills* oleh Trilling dan Fadel, 2009; *scientific approach* oleh Dyer, et al., 2009; *authentic learning and authentic assesment* oleh Wiggins dan McTighe, 2011; Ormiston, 2011; Aitken dan Pungur, 1996; Costa dan Kallick, 1992; Anderson dan Karthwohl (2010). Dengan demikian, lulusan pendidikan memiliki potensi yang signifikan dan strategis untuk menjadi komponen penting dalam masyarakat pengetahuan. Untuk dapat menjalankan misi strategis, ketiga konsep pendidikan abad 21 tersebut perlu diadaptasi untuk mengembangkan pendidikan menuju Indonesia kreatif dan inovatif sejak saat ini karena peran pendidikan sangat penting untuk melahirkan masyarakat pengetahuan di Indonesia (*Indonesian society based on knowledge*) yang bekerja secara kreatif dan inovatif (*creative and innovative work*) berdasarkan daya intelegensia dan daya kreativitas yang tinggi untuk menghasilkan produk kreatif dan inovatif. Salah satu yang perlu mendapatkan dukungan yang besar menurut Hatten (2000:5) memasuki abad 21 adalah tersedianya tenaga terampil dalam kadar yang memadai agar masyarakat mampu meningkatkan daya saing dan kreativitasnya. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai tuntutan dalam kehidupan global mutlak diperlukan. Penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kekayaan negara menjadi sesuatu yang sangat urgen dalam kaitannya sebagai pengganti sumber-sumber alam yang (tidak dapat diperbaharui) yang dimiliki oleh negara. Tersedianya SDM berkarakter unggul, kreatif, inovatif, terampil, menguasai pengetahuan dteknologi yang tinggi serta berkarakter tidak terlepas dari peran strategis pendidikan yang actor utamanya adalah guru.

Kedudukan daya saing Indonesia di tingkat ASEAN dalam berbagai bidang, sebagai berikut: 1. *Human Development index* (2011) (Indeks Pembangunan Manusia), Indonesia berada di urutan 124 dari 187 negara yang disurvei, dengan indeks 0,67%, sedangkan Singapura dan Malaysia menempati indeks yang lebih tinggi, yaitu 0,83% dan 0,86%. (UNDP, 2011). Ditinjau dari indeks tingkat pendidikan tinggi, Indonesia berada pada posisi 14,6%, sementara Singapura dan Malaysia berada pada posisi yang lebih baik yaitu 28% dan 33%. (Subandi,2013). 2. *Education For All Global Monitoring Report* (2012) yang dikeluarkan oleh UNESCO, menyatakan bahwa pendidikan Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 120 negara. Hal ini dihitung berdasarkan penilaian *Education*

Development Index(EDI) atau Indeks Pembangunan Pendidikan. Total nilai EDI itu diperoleh dari rangkuman perolehan survey meliputi empat kategori penilaian, yaitu angka partisipasi pendidikan dasar, angka melek huruf pada usia 15 tahun ke atas, angka partisipasi menurut kesetaraan gender, dan angka bertahan siswa hingga kelas V Sekolah Dasar. (UNESCO: 2012). Posisi di atas naik dari peringkat 69 dari 127 negara pada tahun 2011, menjadi peringkat 64 dari 120 negara pada tahun 2012. 3. *The United Nations Development Programme* (UNDP) tahun 2011 juga telah melaporkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) yang meliputi aspek tenaga kerja, kesehatan, dan pendidikan) Indonesia mengalami penurunan dari peringkat 108 pada 2010, menjadi peringkat 124 pada tahun 2012, dan kemudian naik pada urutan 121 pada tahun 2013. 4. Angka partisipasi keikutsertaan dalam sains, berdasarkan informasi dari TIMMS, Indonesia mengikutsertakan siswa kelas VIII dalam TIMMS (1999, 2003, 2007, dan 2011) masing-masing mendapatkan skor rata-rata jauh dibawah beberapa Negara di Asia (Hongkong, Jepang, Korea, Taiwan, Malaysia, Thailand) tertinggi di tahun 2007 yaitu ranking 35 dari 49 negara. (meski hasilnya dibawah angka 500 dalam katagori *Low International Benchmark*). Dalam katagori belum mampu menggunakan sains yang mereka pelajari bagi kehidupan mereka. Ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia berkecenderungan hafalan dari pada aplikasi (*applying*) dan penalaran (*reasoning*). 5. Pemerintah secara bertahap dan konsisten mendorong peningkatan daya saing melalui berbagai program pembangunan. Upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing nasional, telah membuahkan hasil, sebagaimana dirilis oleh *Global Competitive index* pada tahun 2014/2015 (Bappenas, 2014) dalam bidang (infrastruktur, kualitas kelembagaan, stabilitas ekonomi makro, dan pendidikan, menunjukkan peningkatan yang tajam menjadi peringkat ke-34, dari yang sebelumnya 42. Sementara perguruan tinggi Indonesia yang masuk dalam 800 perguruan tinggi dunia meningkat dari dua perguruan tinggi (UI dan ITB) menjadi 9 perguruan tinggi (8 Universitas Negeri dan 1 Universitas swasta).

Gambaran di atas menjelaskan bahwa pendidikan nasional saat ini masih dihadapkan beberapa persoalan yang perlu diatasi. Faktor penyebab berbagai permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan menurut Santoso (1999) adalah: 1).

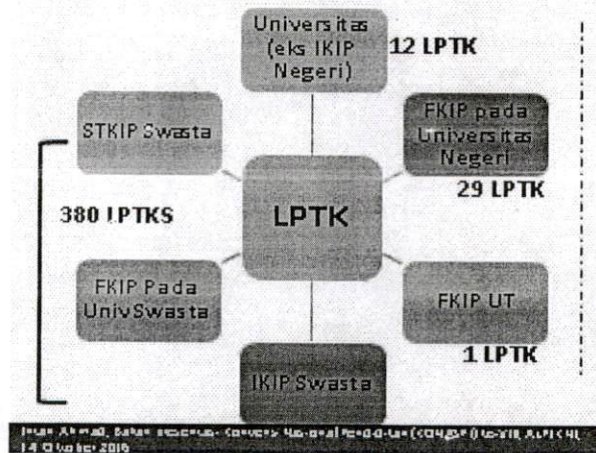
Kelemahan karakter siswa yang ditandai masih rendahnya daya kritis etis-normatif yang semakin memprihatinkan hingga berpengaruh negatif terhadap disiplin diri dan motivasi kerja; 2). Kelemahan daya kreatif dan inovatif sebagian besar peserta didik; 3). Kelemahan karakter keguruan yang dalam pembelajarannya belum atau kurang memperhatikan pengembangan data kritis, kreatif, inovatif, aspek praktik, praktikum dan relevansi serta kurang bersentuhan dengan dunia industri atau dunia kerja; 4). Kelemahan kurikulum yang terkait dengan relevansi antara muatan kurikuler dengan kebutuhan dunia industri atau dunia kerja; 5). Kelemahan pada manajemen pendidikan yang kurang visioner, belum mengedepankan kepemimpinan transformatif, budaya kerja dan budaya organisasi belum berbasis kinerja.

Memasuki kehidupan abad 21, LPTK sebagai penyelenggara pendidikan akademik dan profesi dituntut untuk dapat menghasilkan guru profesional abad 21 dimana guru harus memiliki kompetensi kepribadian, professional/keilmuan, pedagogik dan sosial serta dilengkapi dengan *future life skills – kompetensi abad 21* yaitu kompetensi untuk mengembangkan keterampilan berpikir (*thinking skills*) peserta didik antara lain keterampilan tingkat tinggi (*higher order thinking atau HOTS*) yaitu berpikir kritis, reflektif, kreatif, dan inovatif, kemampuan berkolaborasi atau membangun jejaring secara internal dan eksternal, kemampuan berkomunikasi dengan memanfaatkan TIK (*literacy with ICT*) dan kesadaran global (*global awareness*). Ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia II, dengan dihanguskannya kota Hiroshima dan Nagasaki, Kaisar Jepang berjanji “ Saya akan membalas kekalahan ini, tetapi tidak dengan perang, melainkan dengan teknologi” Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa teknologi akan membawa suatu negara pada posisi daya saing yang tinggi, dan terbukti Jepang mampu mewujudkan daya saingnya melalui teknologi yang dihasilkan. Dalam kesempatan yang sama, Kaisar juga bertanya : “Berapa guru yang masih hidup ?” Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa guru memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan kembali kejayaan Jepang dari kehancurannya akibat perang dunia II, dalam mengejar ketertinggalan teknologi, dan membangun karakter bangsa Jepang melalui pendidikan yang pelaku utama adalah guru. Ketika Uni Soviet (sekarang Rusia) berhasil meluncurkan pesawat ruang angkasa, Presiden Amerika Serikat terkejut, dan bertanya dalam sidang senator “*what’s wrong*

with American classroom” apa yang salah dengan pendidikan di Amerika yang fokusnya adalah apa yang salah dalam pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru. Sebuah pertanyaan yang tidak pernah dilakukan dalam sidang senator yang mengindikasikan kegelisahan seorang kepala negara “adidaya” Amerika terhadap kecanggihan teknologi (ilmu pengetahuan – kecerdasan) dan peradaban Uni Soviet yang melampaui kemajuan Amerika Serikat. Pernyataan tersebut mengisyaratkan pentingnya guru dalam proses pendidikan.

Profil guru lulusan LPTK sebagaimana dijelaskan di atas akan mampu membangun pendidikan nasional yang bermutu dan berdaya saing tinggi termasuk pada satuan pendidikan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Karena guru memegang peran dan posisi yang sangat strategis dalam membangun peradaban suatu bangsa. Sebagaimana dikemukakan oleh Intan Ahmad bahwa kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas SDM-nya. Kualitas SDM dihasilkan oleh pendidikan yang berkualitas. Menghasilkan pendidikan berkualitas, guru menjadi faktor kunci keberhasilan. Hal ini menunjukkan bahwa sangat penting untuk berinvestasi dalam menyiapkan guru profesional yang mampu mendidik generasi muda menuju masa depan Indonesia yang lebih cerah. Guru merupakan salah satu pilar utama dalam pendidikan. Berbagai studi menunjukkan lebih dari 50% hasil belajar siswa dipengaruhi oleh guru. Jadi, agar pendidikan kita bermutu, haruslah diupayakan agar setiap sekolah memiliki guru yang memadai dan berkualitas serta profesional (Bahan presentasi Konvensi Nasional Pendidikan (KONASPI) ke-VIII, ALPTKNI, Jakarta, 14 Oktober 2016). Memasuki kehidupan masa depan, Rotherdam & Willingham (2009) mencatat bahwa kesuksesan seorang siswa tergantung pada kecakapan abad 21, sehingga siswa harus belajar untuk memilikinya. *Partnership for 21st Century Skills* mengidentifikasi kecakapan abad 21 meliputi: berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi dan kolaborasi. Sedang menurut *National Education Association* untuk mencapai sukses dan mampu bersaing di masyarakat global, siswa harus ahli dan memiliki kecakapan sebagai komunikator, kreator, pemikir kritis, dan kolaborator. Mensikapi fenomena perubahan kebutuhan tenaga kerja dan kemajuan, sekolah/madrasah perlu dipersiapkan dan menyiapkan diri dalam menghadapi tantangan abad 21. Pemahaman terhadap kecakapan abad 21 menjadi penting disampaikan kepada

Bentuk LPTK Indonesia (422 LPTK)



Belum semua LPTK terstandar

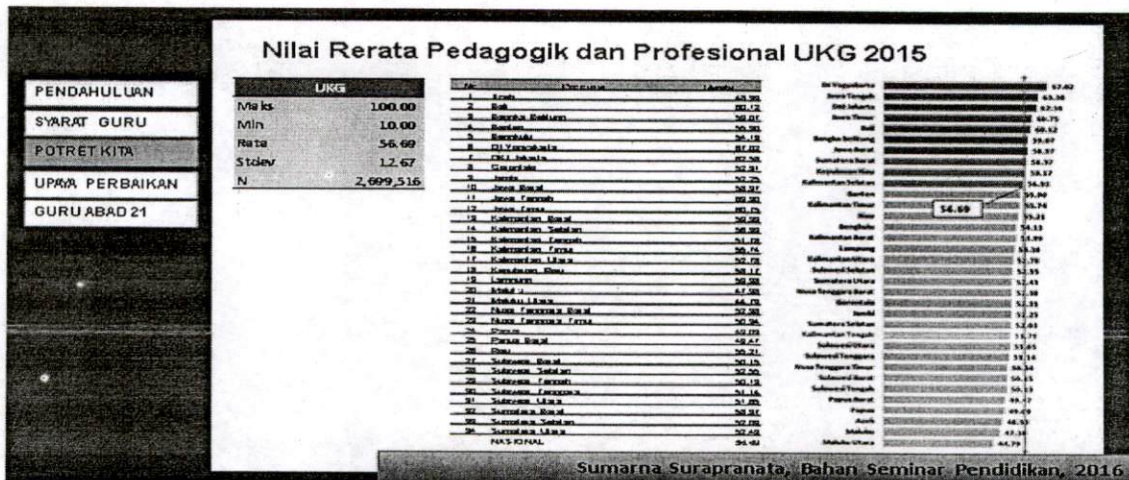
- Disparitas Kualitas
- *Over supply* lulusan Pendidikan Akademik/Sarjana Pendidikan
- Sebagian besar LPTK belum memiliki sekolah laboratorium dan sistem kemitraan dengan sekolah

Akreditasi Institusi LPTK BAN-PT 2016

- A: 2%
- B: 19%
- C: 21%
- D: ~40% belum terakreditasi

Akreditasi Prodi LPTK
Sekitar 1.600 prodi masih berakreditasi C (dari ~3.300 prodi LPTK yang sudah terakreditasi)

Selain permasalahan yang ada di LPTK, guru yang sebagian besar merupakan produk dari LPTK juga dihadapkan dengan berbagai permasalahan antara lain distribusi tidak merata, *mismatched* antara latar belakang pendidikan dan tugas sebagai guru, kekurangan di daerah khusus, masih banyak yang belum berkualifikasi S1 (disparitas kualitas/kompetensi) dan profesionalisme yang masih rendah (Intan Ahmad, Bahan presentasi Konvensi Nasional Pendidikan (KONASPI) ke-VIII, ALPTKNI, Jakarta, 14 Oktober 2016). Profesionalisme guru yang masih rendah dapat dilihat dari hasil uji kompetensi guru (UKG) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimana hasil rerata nasional pada angka 56.69 dari angka maksimal 100 dan perolehan angka minimal 10 yang diperoleh guru peserta UKG yang berjumlah 2.899.516.



Distribusi Rentang Nilai UKG 2015 Berdasarkan Jenjang

No.	Nilai	TK	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	TOTAL
1	1-10	0.01%	0.02%	0.03%	0.02%	0.03%	0.01%	0.02%
2	11-20	0.04%	0.08%	0.13%	0.12%	0.08%	0.06%	0.09%
3	21 - 30	0.43%	2.06%	1.93%	1.72%	1.23%	1.14%	1.77%
4	31 - 40	3.82%	13.23%	9.69%	7.79%	8.26%	8.08%	10.66%
5	41 - 50	14.21%	23.79%	19.29%	15.38%	19.24%	18.33%	20.75%
6	51 - 60	30.80%	29.21%	25.10%	21.42%	26.64%	30.20%	27.57%
7	61 - 70	37.51%	20.02%	23.10%	23.40%	26.30%	26.81%	23.18%
8	71 - 80	12.08%	9.07%	13.84%	17.95%	13.56%	12.84%	11.57%
9	81 - 90	1.08%	2.24%	5.86%	9.48%	4.26%	2.35%	3.73%
10	91 - 100	0.01%	0.29%	1.04%	2.72%	0.41%	0.19%	0.66%
TOTAL		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumarna Surapranata, Bahan Presentasi Seminar Pendidikan, 2016

Sumarna Surapranata, Bahan Presentasi Seminar Pendidikan, 2016

Permasalahan yang tidak kalah seriusnya terkait dengan guru adalah pertumbuhan jumlah guru terutama guru swasta di satuan pendidikan berjalan dengan cepat dan tinggi sebagai akibat dari kebijakan sertifikasi guru. Dengan kata lain pertumbuhan guru swasta berjalan secara tidak normal bila dilihat dari kebutuhan dan rasio kecukupan siswa sebagaimana dalam table di bawah.

Pertumbuhan Guru Honorer

- Pertumbuhan guru honorer jauh lebih pesat dibanding pertumbuhan siswa dan tidak menggambarkan peningkatan kebutuhan karena perubahan jumlah siswa.
- Jika dibandingkan dengan tahun 1999/2000 ketika desentralisasi mulai dilaksanakan, jumlah guru honorer meningkat hampir 10x lipat dari 84,8 ribu menjadi 812,1 ribu. Tidak termasuk guru honorer yang telah diangkat menjadi PNS dan tidak termasuk guru honorer di madrasah. Bila termasuk guru honorer yang telah diangkat menjadi PNS maka jumlahnya adalah 1 juta.

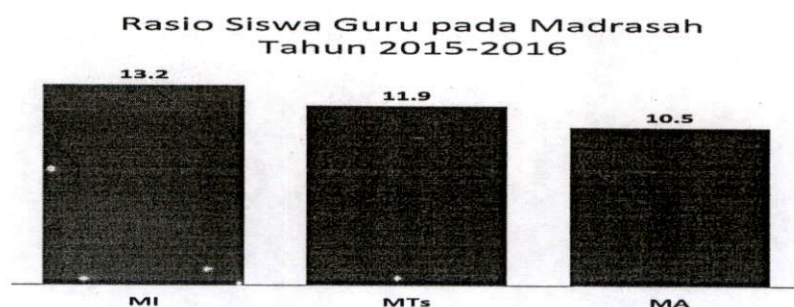
Pertumbuhan Guru PNS – Guru Honorer – Siswa

	1999/2000	2014/2015	Pertumbuhan
Guru PNS	1.417.317	1.747.451	23%
Guru Honorer	84.600	812.064	860%
Siswa	37.993.954	44.505.605	17%
Siswa Sekolah Negeri	31.417.148	35.430.166	13%
Siswa Sekolah Swasta	6.576.706	9.075.439	38%

* Guru honorer di sekolah negeri. Angka total sebenarnya adalah 1 juta guru honorer, namun sekitar 200 ribu guru honorer telah diangkat oleh pemerintah menjadi PNS.

	Rasio Guru PNS: Siswa di Sekolah Negeri		Rasio Guru: Siswa di Sekolah Negeri		Rasio Guru: Siswa di Sekolah Swasta			
	1999/2000	2014/2015	1999/2000	2014/2015	1999/2000	2014/2015		
SD	1:23	1:21	SD	1:23	1:14	SD	1:20	1:15
SMP	1:21	1:19	SMP	1:18	1:13	SMP	1:15	1:10
SMA	1:19	1:20	SMA	1:16	1:14	SMA	1:11	1:8
SMK	1:14	1:20	SMK	1:13	1:12	SMK	1:15	1:11

Selanjutnya pertumbuhan jumlah guru madrasah juga mengalami gerak yang signifikan terutama sejak perlakuan kebijakan sertifikasi guru pada tahun 2007 pertumbuhan guru madrasah sangat besar. Bila dilihat dari rasio guru dengan siswa sebagaimana dijelaskan dalam gambar di bawah bahwa rasio guru-siswa MI berada dalam angka 13,2, rasio guru-siswa MTs berada dalam angka 11,9 dan rasio guru-siswa MA berada dalam angka 10,5. Artinya rasio guru madrasah dari ketiga tingkatan satuan pendidikan berada dalam posisi di bawah standar rasio guru-siswa. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah guru di madrasah (MI, MTs dan MA) saat ini berlebih dari rasio standar. Permasalahan distribusi guru telah menjadi isu nasional, dimana secara nasional rata-rata kecukupan guru sudah berlebih, namun di sisi lain kekurangan guru masih banyak terjadi di tingkat sekolah. Hal ini menggambarkan bahwa telah terjadi ketidakseimbangan penyebaran gurukelas dan guru mata pelajaran dalam satuan pendidikan, antar satuan pendidikan, antar daerah dan sebagainya termasuk pada guru madrasah dan guru mata pelajaran PAI sekolah. Tentang rasio guru madrasah secara nasional sebagaimana dalam bagan di bawah yang dihasilkan USAID Prioritas, (USAID Prioritas, 2017)



Dari uraian latar belakang diatas, dapat ditegaskan bahwa penelitian tentang mutu, jumlah mahasiswa dan ragam program studi di LPTK sebagai penyedia calon guru, profil dan jumlah guru madrasah dan guru PAI sekolah yang sedang bertugas saat ini, kebijakan penataan dan pemerataan atau distribusi guru madrasah dan guru PAI sekolah oleh instansi berwenang antara lain Kanwil Kementerian Agama provinsi dan Kementerian Agama serta Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota di Jakarta, Jawa Barat dan Banten menjadi sangat penting untuk dilakukan sebagai daerah yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan belum adanya riset sejenis dalam rangka penataan dan pemerataan guru dalam membangun pendidikan bermutu dan berdaya saing tinggi memasuki kehidupan abad 21.

B. Permasalahan Penelitian

1. Mengapa LPTK belum menerapkan pola pengendalian jumlah dalam penerimaan calon mahasiswa berdasarkan analisis ketersediaan, kecukupan dan kebutuhan guru madrasah ? Mengapa program studi yang menghasilkan sarjana pendidikan di perguruan tinggi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan bawah Kopertais Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan di bawah Kopertais Jawa Barat, dan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten) masih sangat diminati padahal ketersediaan guru sudah melampaui berdasarkan analisis kecukupan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ? Bagaimana persepsi mahasiswa LPTK tentang profesi guru, dan kemana orientasi kerja mahasiswa LPTK setelah menyelesaikan studi sarjana pendidikan ?

2. Mengapa penataan dan pemerataan guru madrasah (RA, MI, MTs dan MA) baik guru kelas maupun guru mata pelajaran yang berada di bawah pembinaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten beum berjalan secara tepat dalam rangka efesiensi dan efektivitas dan produktivitas kinerja guru madrasah?
3. Bagaimana implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru berdasarkan Peraturan Bersama 5 Menteri (Menteri Keuangan, Menteri Dalam negeri, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri PAN dan RB dan Menteri Agama) tahun 2011 terkait dengan guru madrasah dan guru PAI di 3 provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten ?
4. Bagaimana melakukan analisis proyeksi kebutuhan guru madrasah yang berada di bawah pembinaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten terkait dengan kebutuhan guru kelas RA dan MI, kebutuhan guru mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di madrasah (MI,MTs dan MA), analisis kebutuhan materi dan bidang diklat dalam rangka pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB), analisis kebutuhan untuk memenuhi tuntutan kompetensi dan pembelajaran abad 21;

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan data profil dan ketersediaan mahasiswa calon guru yang sedang studi di LPTK PTKI yaitu mahasiswa LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan mahasiswa LPTK PTKIS di bawah Kopertais Jakarta, mahasiswa LPTK UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan mahasiswa LPTK PTKIS di bawah Kopertais Jawa Barat, dan mahasiswa LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Bantenterkait dengan aspek-aspek sebagai berikut : jenis kelamin, latar belakang sosial ekonomi, asal daerah, program studi, persepsi tentang profesi guru, dan orientasi kerja setelah menyelesaikan studi sarjana,

2. Menyajikan data profil dan ketersediaan guru madrasah (RA, MI, MTs dan MA) baik guru kelas maupun guru mata pelajaran yang berada di bawah pembinaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten berdasarkan kualifikasi akademik, status kepegawaian, jenis kelamin, umur, kepangkatan fungsional, sertifikasi profesi, kesesuaian bidang tugas, pemenuhan jumlah jam mengajar, rasio kecukupan guru dengan siswa; kinerja guru profesional dan keterlibatan guru dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB);
3. Melakukan analisis keefektivan implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru berdasarkan Peraturan Bersama 5 Menteri (Menteri Keuangan, Menteri Dalam negeri, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri PAN dan RB dan Menteri Agama) tahun 2011 terkait dengan guru madrasah dan guru PAI di 3 provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten;
4. Melakukan analisis proyeksi kebutuhan guru madrasah yang berada di bawah pembinaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten terkait dengan kebutuhan guru kelas RA dan MI, kebutuhan guru mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di madrasah (MI, MTs dan MA), analisis kebutuhan materi dan bidang diklat dalam rangka pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB), analisis kebutuhan untuk memenuhi tuntutan kompetensi dan pembelajaran abad 21;
5. Memberikan formulasi alternatif kebijakan dalam penataan dan pemerataan guru madrasah yang berada di bawah pembinaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

b. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini mempunyai posisi dan arti yang sangat signifikan terkait dengan penataan dan pemerataan guru khususnya guru madrasah yang saat ini dari segi rasio jumlah secara nasional berada dalam kondisi yang sangat berlebih. Namun dari segi kualifikasi dan kesesuaian dengan bidang tugas mengajar guru madrasah dihadapkan dengan masalah yang serius karena terjadi mismatch yang tinggi dan tingkat kinerja profesionalitas yang rendah. Dilihat dari sisi hulunya, permasalahan guru juga tidak

terlepas dari lembaga pendidikan calon guru di LPTK yang dalam rekrutmen calon mahasiswa belum menerapkan pola penerimaan calon mahasiswa berbasis kuota dan analisis kebutuhan. Pola rekrutmen demikian mengakibatkan terjadinya surplus sarjana pendidikan calon guru dan dapat menimbulkan permasalahan terhadap kesempatan kerja lulusan sarjana pendidikan yang pada akhirnya akan berdampak pada adanya pengangguran bagi lulusan sarjana pendidikan.

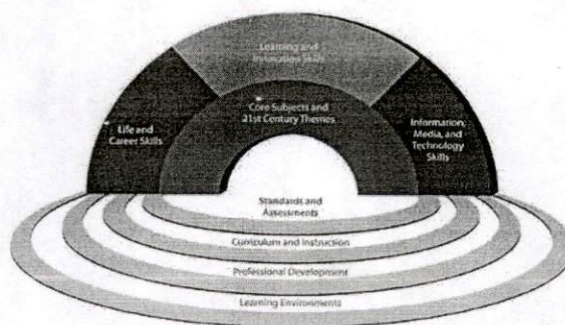
Karena itu melalui penelitian ini akan terlihat secara jelas terkait dengan permasalahan guru madrasah khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten untuk dilakukan langkah-langkah kebijakan penataan dan pemerataan secara tepat dan proporsional serta dilakukan pembinaan secara tepat dalam penguatan kompetensinya sebagai guru profesional. Dengan demikian penelitian akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam mengatasi permasalahan guru madrasah khususnya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Melalui hasil penelitian ini dapat dirumuskan alternatif kebijakan penataan dan pemerataan guru madrasah yang tepat sehingga diperoleh efisiensi anggaran terutama dalam pembayaran tunjangan profesi guru dan bantuan tunjangan fungsional guru, efektivitas dan produktivitas dari kinerja guru yang bermutu dan profesional.

D. Literatur Review

1. Profil Guru Abad 21 : Memiliki Kompetensi Profesional dan Kecakapan Abad 21

Profil guru abad 21 termasuk guru madrasah (guru kelas dan guru mata pelajaran) dan guru mata pelajaran PAI sekolah wajib memiliki kualifikasi, kompetensi dan sertifikat pendidik profesional sebagaimana diamanahkan dalam perundang-undangan yaitu minimal berkualifikasi akademik S1/D4, memiliki kompetensi keguruan dan sertifikat pendidikan profesional yang diperoleh melalui program sertifikasi guru maupun melalui pendidikan profesi guru (PPG). Selain itu guru abad 21 juga wajib memiliki kecakapan abad 21 dan memahami paradigma pendidikan abad 21 (Tim BSNP, 2010, Arifin, Z. 2013). *The North Central Regional Education Laboratory (NCREL)* dan *The Metiri Grup* (2003) dalam (Trisdiono, 2013, Arifin, Z. 2013) mengidentifikasi keterampilan abad ke-21 yang diperlukan dalam empat kategori: kemahiran era digital, berpikir inovatif (menemukan ide baru dan original), komunikasi yang efektif, dan produktivitas yang tinggi. ATCS (*assessment*

and teaching for 21st century skills) menyimpulkan empat hal pokok berkaitan dengan kecakapan abad 21 yaitu cara berpikir, cara bekerja, alat kerja dan kecakapan hidup. Cara berpikir mencakup kreativitas, berpikir kritis, pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan belajar. Cara kerja mencakup komunikasi dan kolaborasi. Alat untuk bekerja mencakup teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dan literasi informasi. Kecakapan hidup mencakup kewarganegaraan, kehidupan dan karir, dan tanggung jawab pribadi dan sosial. Kerangka kompetensi 21st Century Skills dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1 Kerangka Kompetensi 21st Century Skills
(Partnership for 21st Century Skills, 2002)

Kecakapan abad 21 juga menjadi kebutuhan siswa dalam memasuki kehidupan abad 21 yang perlu ditransformasikan oleh guru. Kecakapan siswa untuk abad 21 antara lain: 1) belajar dan keterampilan inovasi yang mencakup kreativitas dan inovasi, berpikir kritis dan problem solving, komunikasi dan kolaborasi; 2) informasi, media dan keterampilan teknologi yang mencakup literasi informasi, literasi media, dan literasi ICT; 3) hidup dan keterampilan karir yang mencakup fleksibilitas dan adaptasi, inisiatif dan *self-direction*, ketampilan sosial dan lintas budaya, produktivitas dan akuntabilitas, dan kepemimpinan dan tanggung jawab (Partnership for 21st Century Skills, 2002). Educational Testing Service (ETS) mendefinisikan keterampilan abad ke-21 sebagai kemampuan untuk : 1) mengumpulkan dan/atau mengambil informasi, 2) mengatur dan mengelola informasi, 3) mengevaluasi kualitas, relevansi, dan kegunaan informasi, dan 4) menghasilkan informasi yang akurat melalui penggunaan sumber daya yang ada (Trisdiono, 2013).

Kang, et al., (2012) memberikan kerangka kecakapan abad 21 dalam domain kognitif, afektif, dan budaya sosial. Domain kognitif terbagi dalam sub domain kemampuan

mengelola informasi, yaitu kemampuan menggunakan alat, sumberdaya dan ketrampilan inkuiri melalui proses penemuan; kemampuan mengkonstruksi pengetahuan dengan memproses informasi, memberikan alasan, dan berpikir kritis; kemampuan menggunakan pengetahuan melalui proses analitis, menilai, mengevaluasi, dan memecahkan masalah; dan kemampuan memecahkan masalah dengan menggunakan kemampuan metakognisi dan berpikir kreatif. Domain afektif mencakup sub domain : identitas diri yakni mampu memahami konsep diri, percaya diri, dan gambaran pribadi; mampu menetapkan nilai-nilai yang menjadi nilai-nilai pribadi dan pandangan terhadap setiap permasalahan. Pengarahan diri ditunjukkan dengan menguasai diri dan mampu mengarahkan untuk mencapai tujuan dalam bingkai kepentingan bersama. Akuntabilitas diri ditunjukkan dengan inisiatif, prakarsa, tanggung jawab, dan sikap menerima dan menyelesaikan tanggung jawabnya. Domain budaya sosial ditunjukkan dengan terlibat aktif dalam keanggotaan organisasi sosial, diterima dalam lingkungan sosial, dan mampu bersosialisasi dalam lingkungan. Untuk itu guru dalam pembelajaran dituntut untuk menyajikan pandangan holistik pembelajaran abad ke-21 dan pembelajaran yang terpadu (menggabungkan fokus diskrit pada hasil siswa abad ke-21 yaitu campuran dari keterampilan, pengetahuan konten, keahlian dan kemahiran) dengan sistem pendukung yang inovatif untuk membantu siswa menguasai kemampuan multi-dimensi yang diperlukan di abad ke-21 dan seterusnya.

Pemahaman dan penguasaan subjek dan tema abad 21 menentukan kesuksesan seorang siswa. *Partnership for 21st Century Skills* (2009) memberikan rumusan subjek mata pelajaran abad 21 meliputi : bahasa terkait dengan bahasa resmi masing-masing negara, bahasa pergaulan dunia, seni, matematika, ekonomi, pengetahuan alam (*science*), geografi, sejarah, pemerintahan, dan kewarganegaraan. Menurut *Partnership for 21st Century Skills* (2009) tema pembelajaran abad 21 adalah: kesadaran global; literasi keuangan, ekonomi, bisnis dan wirausaha; kesadaran sebagai warga negara; literasi kesehatan; dan literasi lingkungan. *Partnership for 21st Century Skills* (2009) mengidentifikasi lima sistem pendukung penting untuk memastikan penguasaan keterampilan siswa abad ke 21 antara lain: 1). standar dan penilaian keterampilan abad 21: a) mendukung keseimbangan penilaian tes standar serta penilaian normative dan sumatif, b) menekankan pemanfaatan umpan balik berdasarkan kinerja peserta didik,

c) membolehkan pengembangan portofolio siswa; 2). kurikulum dan instruksi abad 21: mengembangkan kurikulum mandiri berbasis individu, hal ini tidaklah gampang diperlukan suatu disain dan konsep matang serta terbukti efektif dalam implementasinya. Sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi kesiapan fasilitas dan sarana dan prasarana, kematangan peserta ajar, infrastruktur dan suprastruktur manajemen institusi yang handal, konten pengetahuan yang lengkap, dan sebagainya (BSNP, 2010); 3). pengembangan profesional abad 21; untuk melahirkan profil guru Indonesia yang profesional di abad 21 yaitu; a) memiliki kepribadian yang matang dan berkembang; b) penguasaan ilmu yang kuat; c) keterampilan untuk membangkitkan peserta didik kepada sains dan teknologi; dan d) pengembangan profesi secara berkesinambungan; 4). pembelajaran lingkungan abad 21; a) menciptakan latihan pembelajaran, dukungan SDM dan infrastruktur, b) memungkinkan pendidik untuk berkolaborasi, berbagi pengalaman dan integritasnya dikelas, c) memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan konteks dunia, d) mendukung perluasan keterlibatan komunitas dalam pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung

Partnership for 21st Century Skills (2009) mengidentifikasi enam elemen kunci untuk abad ke-21 yaitu mendorong pembelajaran: 1) Menekankan pelajaran inti (*core subject knowledge*); apapun keterampilan yang dikembangkan, harus didasarkan pada pengetahuan mengenai isi materi mata pelajaran utama dan pemahaman mengenai ciri utama tersebut, 2) menekankan keterampilan belajar; siswa memerlukan keterampilan belajar yang terdiri dari tiga keterampilan yaitu keterampilan terkait dengan informasi dan komunikasi, keterampilan berpikir dan memecahkan masalah, keterampilan interpersonal dan keterampilan mengatur diri sendiri. Seorang guru perlu mengintegrasikan keterampilan-keterampilan tersebut dalam pembelajaran secara sengaja, strategis dan seluas-luasnya. (3) menggunakan alat 21st century untuk mengembangkan keterampilan belajar; siswa perlu belajar bagaimana menggunakan alat-alat yang esensial untuk kehidupan sehari-hari dan untuk produktif ditempat kerja. Kemampuan untuk memanfaatkan ICT sangat diperlukan di abad 21. (4) Mengajar dan belajar dalam konteks 21st century; siswa belajar materi melalui contoh-contoh, penerapan, dan pengalaman dunia nyata baik di dalam maupun luar sekolah. (5) mengajar dan mempelajari isi 21st

century; pendidik perlu memadukan pengetahuan dan keterampilan di abad 21. (6) Menggunakan penilaian 21st *century* yang mengukur 21st *century skills*; untuk mengukur keterampilan di abad 21 perlu *assesment* yang berkualitas tinggi sehingga bisa mengukur prestasi siswa dalam unsur-unsur abad 21. Agar instrumen yang digunakan efektif harus dibuat secara tepat, berkelanjutan dan terjangkau untuk semua jenjang pendidikan dengan menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan jelas waktunya.

Guru masa depan harus bias berfungsi sebagai pembawa perubahan prilaku belajar mengajar, termasuk mengubah kebiasaan mengajar yang sudah tidak sesuai dengan kemajuan pendidikan terkini (M. Nuh, 2013 : 2). Selanjutnya guru masa depan adalah guru profesional yang memiliki karakteristik sebagaimana di kemukakan oleh Suyanto (2007 : 32) sebagai berikut : 1). Memiliki landasan pengetahuan yang kuat; 2). Memiliki kompetensi individual yang kuat; 3). Dihasilkan dari sistem seleksi dan sertifikasi yang baik; 4). Mampu bekerjasama dan berkompetisi secara sehat; 5). Memiliki kesadaran profesional yang tinggi; 6). Memahami prinsip-prinsip etik (kode etik) dan sanksi profesi; 7). Memiliki militansi profesional; 8). Menjadi anggota organisasi profesi. Selanjutnya Dja'ali menegaskan bahwa guru masa depan merupakan sosok pendidik yang unggul dalam kompetensi pedagogik, unggul dalam penguasaan bidang keahlian, unggul dalam kompetensi kepribadian, unggul dalam kompetensi sosial disertai dengan karakter kuat dan berjiwa pendidik, cerdas dan berakhlak mulia, cinta tanah air dan memiliki "kesepuhhatian" dan "kemurahhatian" dalam melaksanakan tugas profesional sebagai guru pendidik.



Dengan demikian guru masa depan sebagai figur profesional dituntut untuk dapat mengimplementasikan paradigma pembelajaran abad 21 yang menekankan kepada kemampuan siswa untuk berpikir kritis, menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, menguasai teknologi informasi komunikasi, dan berkolaborasi. Pencapaian keterampilan tersebut dapat dicapai dengan penerapan metode pembelajaran yang sesuai dari sisi penguasaan materi dan keterampilan. Kemampuan berpikir kritis siswa dibangun melalui pembelajaran yang menerapkan taksonomi pembelajaran sebagaimana disampaikan oleh Benyamin Bloom tahun 1956 yang telah direvisi oleh Andersen pada tahun 2001. Bloom membagi tujuan pendidikan menjadi tiga ranah yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Tujuan pendidikan mengalami penyempurnaan pada tahun 2001 (Liliasari, 2012). Taksonomi pembelajaran dikelompokkan dalam dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif. Dimensi proses pengetahuan terdiri empat bagian yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Guru masa depan diibaratkan sebagai "air bening yang menjernihkan".

2. Pendidikan Guru di LPTK

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Ayat (14) menegaskan bahwa Lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak

usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan. Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan (ayat 1). Kurikulum pendidikan guru pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan harus mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan nasional, pendidikan bertaraf internasional, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal (ayat 2). Dengan demikian guru lulusan LPTK memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dalam skala nasional bahkan internasional.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pendidik profesional harus memiliki *kualifikasi akademik* dan *kompetensi* sebagai agen pembelajaran. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik, yang dalam kaitan dengan pendidikan dasar dan menengah adalah sarjana (S1) atau diploma empat (D4). Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan usia dini meliputi empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial (PP 19/2005 ps 28 ayat 3). Inilah yang mendasari terbukanya peluang pendidikan guru model konsekutif karena, setelah seseorang memiliki kualifikasi akademik tertentu, dan bila yang bersangkutan ingin mengabdikan dirinya sebagai pendidik, yang bersangkutan bisa melakukan dengan menambah kemampuannya dengan menguasai/memiliki kompetensi keguruan, yang diformat dalam Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Bila demikian persoalannya bagaimana eksistensi program pendidikan tenaga kependidikan yang menghasilkan sarjana (S1) pendidikan (S.Pd) yang selama ini menempuh pendidikan.

Penguasaan dimensi-dimensi konsep akademik yang berhubungan dengan layanan ahli keguruan-kependidikan tersebut serta pengalaman mengaplikasikan dalam profesinya sebagai guru, akan menimbulkan secara berkelanjutan *nurturant effects* pada kemampuan sosial dan kemampuan personal yang pada gilirannya akan berkontribusi pada kepribadian

guru secara makro. Oleh karena itulah, perancangan program pendidikan guru secara prioritas sebenarnya bertumpu pada penggarapan *kemampuan akademik* dan *kemampuan profesional* (yang seyogyanya harus diartikan sebagai kemampuan penerapan bidang akademik dalam kancah profesi yang menjadi garapan layanan ahli keguruan-kependidikan, bukan justru penguasaan *disciplinary content* yang seyogyanya tidak ditampilkan terpisah dari bidang garapan profesi). Dari proses pendidikan yang secara tekun dan konsisten mempedomani penggarapan kemampuan akademik dan profesional tersebut, disertai dengan cara-cara pengelolaan proses transformasi itu yang dapat menimbulkan interaksi pembelajaran yang inspiratif, interaktif, menantang, menyenangkan, memotivasi (*I2M3*) dan memberikan teladan, akan terbentuk pengaruh pengiring (*nurturant effects*) pada kemampuan personal maupun kemampuan sosial, minimal yang terkait dengan kancah garapan layanan ahli keguruan-kependidikan. Dengan mempertimbangkan dan mempersilahkan model konsektif dalam pendidikan profesi guru dilaksanakan (yang memang peluangnya dibuka oleh aspek legal), maka sangatlah wajar LPTK tetap memperjuangkan *model pendidikan bersamaan/ integratif* (concurrent) bagi pendidikan guru di tanah air yang memang juga peluangnya dimungkinkan pada UU No.14/2005), dan jangan justru dinafikan bahwa LPTK cukup atau dianggap cukup sibuk hanya dengan mengelola pendidikan profesi guru yang konon diperkirakan akan berlimpah ruah dengan para calon mahasiswa yang akan mengikuti pendidikan profesi guru dengan pola konsektif. Bila hal terakhir itu memang benar terjadi, berarti lonceng kematian bagi eksistensi kelembagaan dan keilmuan LPTK yang belum lagi disikapi secara tidak proporsional dalam pengembangan programnya setelah menjalani fungsi perluasan mandat (*wider mandate*). Hal ini perlu ditekankan supaya LPTK jangan mudah tergelincir secara tidak proporsional, dan bahkan meninggalkan tugas utamanya.

Kompetensi akademik diajukan dengan prinsip penguasaan *disciplinary content* dan *pedagogical content* secara mengorkestra, yang dapat dijabarkan ke dalam subkompetensi (1) kemampuan mengenal peserta didik secara mendalam, (2) penguasaan bidang studi yang menyangkut substansi dan epistemologi ke-ilmuan (*disciplinary content*), dan pengemasan bidang keilmuan tersebut menjadi bahan ajar sesuai dengan konteks kurikuler maupun karakteristik peserta didik (dalam subkompetensi inilah peluang LPTK

untuk mengkriet dan memvariasi programnya menjadi multi exit sehingga menjadi menarik dan sesuai kebutuhan lapangan), (3) kemampuan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, yang mampu memfasilitasi pembentukan kemampuan yang utuh yang mampu memadukan antara dimensi pengetahuan (faktual, konsep, procedural, dan metakognitif) dengan dimensi proses (pengetahuan, pemahaman aplikasi, analisis/mengkaji, evaluasi dan mencipta) seperti yang dikemukakan Anderson & Krathwohl (2001), sehingga pembentukan sikap dan keterampilan kognitif, personal dan sosial maupun psikomotorik yang diperoleh melalui latihan menjadi terbentuk secara utuh, dan (4) kemampuan mengembangkan keterampilan profesional secara berkelanjutan. Hal ini harus tertanam menjadi kebiasaan dan sikap profesional guru dalam kesehariannya, yang didapatkan berdasarkan hasil refleksi dari dampak kinerjanya (*reflective practitioner*).

Kompetensi profesional merupakan kemampuan untuk menerapkan kompetensi akademik dalam kancah profesi keguruan-kependidikan, yang diimplementasikan melalui pengalaman lapangan (PPL) secara bertahap dari, pengenalan lapangan, latihan keterampilan dasar mengajar, latihan terbimbing, latihan penugasan terstruktur, dan latihan mandiri, dalam kaitannya dengan pengelolaan pembelajaran (merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan memonitoring proses pembelajaran) dan keterampilan membina hubungan sosial dengan siswa, teman sejawat dan orang tua peserta didik. Dengan demikian, subkompetensi profesional ini meliputi (1) keterampilan menerapkan kompetensi akademik dalam proses pembelajaran dan (2) keterampilan berhubungan sosial dengan pihak terkait dalam rangka peningkatan dan efektivitas pembelajaran yang mendidik. Keterampilan (kompetensi) personal merupakan unsur kunci bagi guru profesional, sehingga menjadi unsur kunci pula dan termasuk dalam sub-kompetensi profesi guru karena, bila ditelusuri lebih jauh pembentukan kompetensi ini bukanlah merupakan dampak *instruksional effects* dari suatu pendidikan formal yang diikuti calon guru. Ia lebih banyak merupakan *nurturant effects* dari pencapaian kompetensi akademik dan kompetensi profesional, dan bahkan juga telah terbentuk dasar – dasarnya dari pendidikan sebelumnya, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dengan demikian, kompetensi personal ini dapat dideskripsi dengan indikator beriman dan taqwa, berahlak mulia, arif demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur dan sportif,

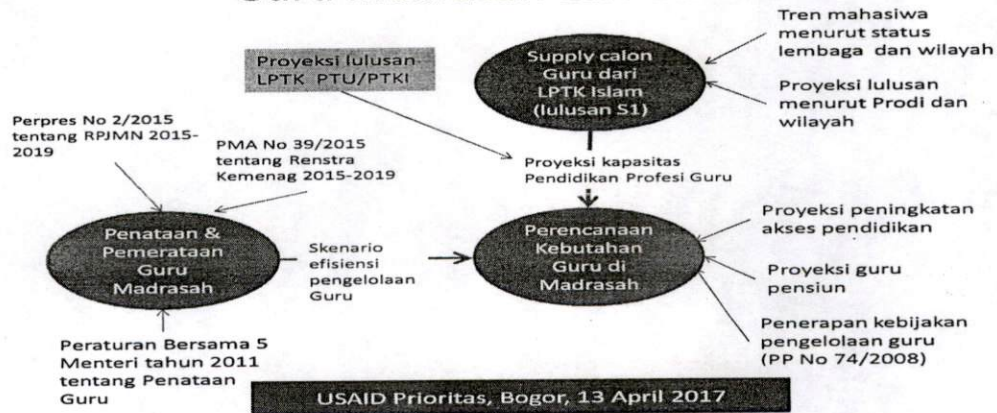
yang terjadinya bersenyawa pada saat proses pencapaian kompetensi akademik dan profesional. Dua standar kompetensi (kompetensi akademik dan kompetensi profesional) diusulkan menjadi landasan dasar *kualifikasi akademik seorang sarjana (S1) pendidikan (S.Pd)*, dan masing-masing sub-kompetensi yang diuraikan di atas menjadi kompetensi dasar, yang nantinya dalam proses pengembangan lanjut digunakan sebagai dasar pengembangan materi sebagai muara dari pengalaman belajar yang harus didapatkan. Dengan penguasaan kualifikasi akademik seperti itu, di samping memenuhi aspek legal, model bersamaan (*concurrent*) dalam pendidikan guru dapat diselenggarakan secara konsisten, karena kontinuitas program tersebut merupakan landasan yang kokoh seseorang (S.Pd) untuk menjalani pendidikan profesi guru. Proses pendidikan seperti itu akan memberi peluang yang lebih besar untuk menghasilkan calon-calon guru yang profesional, ketimbang hanya menumpangkan (*on top*) program pendidikan profesi guru setelah seseorang menguasai kualifikasi akademik tertentu yang dari semula dalam proses pembelajarannya sama sekali tidak *pernah membumi* dengan profesi keguruan. Walaupun demikian, dalam perkembangannya ke depan pendidikan profesional guru (prajabatan) pola konsekutif yang dinamakan pendidikan profesi cenderung pasti dilakukan dan malah akan ditugaskan pada LPTK, karena hal tersebut telah teramanatkan dalam perundangan, dan hal ini harus dijadikan kesempatan yang sangat berharga bagi LPTK, karena akan mendapat pengalaman yang berharga untuk mencermati kedua model pendidikan profesi guru.

3. Penataan dan Pemerataan Guru

Penataan dan pemerataan guru menjadi salah satu pekerjaan rumah dalam meningkatkan mutu pendidikan yang belum terselesaikan dengan baik. Sekali pun hal ini disadari sebagai bidang permasalahan strategis, namun pemerintah belum dapat bersinergi secara efektif untuk pemeratakan guru. Penumpukan guru pada daerah perkotaan, kekurangan guru di daerah terpencil dan terluar merupakan menjadi kendala pemerataan mutu. Keadaan yang tertangani dengan baik berpotensi menjadi salah satu penghambat pemerataan dan peningkatan mutu. Rasio guru di Indonesia cukup besar yaitu 1:15. Tidak seperti di Singapura, Amerika, Inggris, Tiongkok, dan Malaysia. Di Malaysia memiliki rasio 1:22, sedangkan Tiongkok dengan penduduk lebih banyak 1:18, menurut Indra

Charismiadi. Indonesia memiliki tiga juta guru. Penyebaran guru di Indonesia belum merata yang dibuktikan dengan banyaknya daerah yang meneriakan kekurangan guru. Di sisi lain, menurut keterangan yang disampaikan Abu Bakar (UPI) yang terlibat di kegiatan USAID Prioritas yang memprioritaskan Teacher Deployment menyatakan bahwa Indonesia punya guru banyak, tapi tidak merata hingga di pelosok republik ini. Di pelosok guru banyak non pns. Di sebagian besar sekolah swasta di kota-kota pun juga lebih banyak non-PNS. Sebagian dari guru tersebut belum berkualifikasi S1 dan banyak yang belum mengampu pelajaran relevansi disiplin keilmuan yang dimilikinya. Guru banyak, tetapi mutunya memerlukan peningkatan. Data tentang rasio guru di Indonesia menurut Hamid Muhammad perlu dilihat ulang. Rasio itu perlu dipertanyakan karena realitanya banyak sekolah kekurangan guru. Kekurangan tidak hanya terjadi di pelosok, bahkan di kota besar. Data seharusnya dirinci tidak hanya sebatas distribusi aggregate, tetapi harus sampai rasio per mata pelajaran. Dalam PP 74 tentang guru pasal 17 ayat (1) ditegaskan bahwa guru tetap pemegang sertifikat pendidikan berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya sebagai berikut : untuk TK/RA 15:1; SD 20:1, MI 15:1; SMP 20:1, MTs 15:1; SMA 20:1, MA 15:1; SMK 15:1, MAK 12:1. Harapan seperti yang dilontarkan Hamid Muhammad, dimaksudkan untuk meningkatkan validitas data pemerataan guru yang telah dilaksanakan oleh Kemendikbud dalam beberapa tahun belakangan ini. Tanpa itu, perbaikan mutu pendidikan Indonesia sulit diwujudkan. Namun demikian pencapaian target penataan dan pemerataan belum terwujud. Masalah penataan dan pemerataan tak dapat diisolasi sebagai masalah pendidikan. Pemecahannya terkait pada banyak dimensi. Sebaran guru bisa ditahan banyak pihak karena terkait pada bidang kehidupan lain. Banyaknya guru yang ibu-ibu juga semakin sulit pemeratakan karena kepentingan keutuhan keluarga. Apalagi penataan antar daerah pasti tak kalah sulit. Fakry mengingatkan agar data sebaran guru terus diperbaharui. Jangan teledor dalam memperbaharui data. Jangan sampai data lama digunakan untuk mengambil keputusan, hasilnya bisa tak sesuai dengan yang diharapkan. USAID Prioritas dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan upaya strategis terkait dengan penataan dan pemerataan guru di beberapa provinsi seperti di Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pendekatan *Supply & Demand* Guru Madrasah dan Guru PAI



F. Metodologi Penelitian

Secara metodologis, beberapa hal yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan gabungan antara pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh data kualitatif, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk memperoleh data kuantitatif. Penggunaan pendekatan gabungan (*mix method*) agar data yang diperoleh secara utuh dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan data penelitian. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dalam perumusan kebijakan baik oleh LPTK maupun oleh instansi berwenang dalam penataan dan pemerataan guru madrasah dan guru PAI sekolah.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk gabungan dari beberapa jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif, penelitian kebijakan, dan penelitian survei. Ragam jenis penelitian yang digunakan dimaksudkan untuk mendapatkan data penelitian yang tepat, akurat dan komprehensif.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain metode deskriptif, metode survey, metode analisis kebijakan dan metode eksploratif. Kesemua jenis metode penelitian tersebut digunakan untuk menghasilkan penelitian yang komprehensif dengan multi dimensinya.

4. Sumber Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi dari instansi pemerintah (Dinas Pendidikan provinsi dan Kabupaten/kota, Bidang Pendidikan Kanwil Kementerian Agama provinsi dan Seksi Pendidikan Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, LPTK, Kopertis, Kopertais dan instansi lain yang relevan, data dari unsur pimpinan perguruan tinggi dan LPTK (Rektorat, Dekanat, dan Jurusan, Biro), para dosen, para mahasiswa dari perguruan tinggi yang menjadi sasaran penelitian yang dilakukan secara sampling. Wawancara dan FGD juga dilakukan kepada unsur aparatur dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota dan unsur aparatur Kementerian Agama provinsi dan kabupaten/kota di tiga wilayah yaitu Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen dan hasil penelitian yang relevan. Sasaran penelitian ini adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Perguruan Tinggi negeri seperti UNJ, UPI, FKIP Untirta, FKIP Unsil (Kementaristekdikti), LPTK swasta yang berada di bawah pembinaan Kopertis, LPTK Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) negeri yaitu LPTK UIN Jakarta, UIN Bandung dan UIN Banten) dan LPTK PTKI Swasta yang berada di bawah pembinaan Kopertais Jakarta dan Jawa Barat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder diperoleh melalui teknik studi dokumentasi, penyebaran angket/questioner kepada responden, observasi dan wawancara mendalam dengan *focus group discussion (FGD)*. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pedoman studi dokumentasi, daftar

pertanyaan/pernyataan, pedoman observasi, pedoman wawancara dengan *focus group discussion (FGD)* dan rekaman foto.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dilakukan pengolahan data dengan *microsoft excell* untuk mendapatkan kategorisasi data dan menggunakan teknik analisis data secara deskriptif, *content analysis*, analisis kebijakan dengan *SWOT Analysis*, *analisis Supply and Demand* dan analisis kinerja dengan menggunakan *balanced score card*. Dengan analisis tersebut akan diperoleh hasil penelitian yang terkait dengan mutu LPTK, ragam program studi dan jumlah mahasiswa LPTK sebagai dimensi ketersediaan calon guru, profil dan jumlag guru madrasah dan guru PAI sekolah sebagai aspek ketersediaan, kecukupan dan kebutuhan guru sesuai dengan bidang yang relevan berdasarkan rasio kecukupan guru dan siswa. Selain itu akan diperoleh hasil penelitian terkait dengan langkah-langkah kebijakan penataan dan distribusi guru oleh instansi berwenang untuk mengatasi over supply guru dan kebijakan LPTK terkait dengan kuota rekrutmen calon mahasiswa baru agar terhindar dari over supply calon guru.

G. Waktu dan Tempat

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam rentang waktu lima bulan yaitu sejak Juii – Nopember 2017. Rincian jadwal kegiatan akan disampaikan kemudian.

H. Dana Penelitian

Dana untuk kegiatan penelitian ini diharapkan mendapatkan bantuan hibah dari dana peneltitian yang terdapat dalam DIPA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui anggaran Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun anggaran 2017 (rincian penggunaan dana sebagaimana terlampir).

I. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah adanya data dan informasi terkait dengan mutu LPTK sebagai lembaga pendidikan tinggi penghasil calon guru, jumlah mahasiswa dan ragam program studi yang menghasilkan calon guru sebagai gambaran tentang ketersediaan calon guru. Selain itu hasil penelitian ini juga menyediakan data dan informasi terkait dengan profil guru madrasah dan guru PAI sekolah di Jakarta,

Jawa Barat dan Banten, ketersediaan, kecukupan dan kebutuhan guru madrasah dan PAI sekolah di ketiga wilayah tersebut. Hasil penelitian ini juga menginformasikan tentang langkah-langkah kebijakan penataan dan pemerataan guru madrasah dan guru PAI sekolah yang dilakukan oleh instansi berwenang dan langkah-langkah kebijakan LPTK dalam rekrutmen calon mahasiswa terkait dengan supply and demand guru madrasah dan guru PAI sekolah. Oleh karena itu hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi :

1. Pimpinan perguruan tinggi (rektor dan dekan) LPTK yang berada di Jakarta, Jawa Barat dan Banten untuk memperbaiki dan menyempurnakan kerangka kebijakan dan langkah strategis dan operasional (*action plan*) dalam rekrutmen calon mahasiswa dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan di LPTK dalam rangka menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi.
2. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam melakukan perumusan kebijakan strategis terkait dengan penataan dan pemerataan guru madrasah dan guru PAI yang tepat dan berdampak pada adanya efisiensi, efektivitas dan peningkatan kinerja guru profesional pada satuan pendidikan madrasah dan sekolah terkait dengan penyelenggaraan pembelajaran PAI. Pemerinrah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) di Jakarta, Jawa Barat dan Banten dalam kaitan dengan penyediaan guru PAI sekolah
3. *Stakeholder* pendidikan seperti masyarakat penyelenggara pendidikan sebagai pengguna lulusan LPTK dalam hal rekrutmen guru agar memperhatikan data ketersediaan dan kecukupan guru sehingga tidak terjadi over supply guru di satuan pendidikan madrasah dan sekolah untuk guru PAI.

Daftar Pustaka/Bahan Bacaan

- Ahmad. Intan. 2016. *Arah dan Kebijakan Kementerian Ristekdikti : Kurikulum dan Pembelajaran di LPTK*, Bahan Presentasi Konaspi
- Anderson, Orin W. And Krathwool, David R. 2001. *A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing*. New York : Addison Wesley Longman, Inc.
- Arifin, Z. 2013. Penggunaan *Information Communication and Technology* dalam Pendidikan: Persiapan Menghadapi Abad Ke- 21. *Artikel*. Program Pengembangan Kurikulum. UPI Bandung.

- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2010. *Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI*. Versi 1.0. Tahun 2010.
- Beers, S. Z. 2012. *21st Century Skills: Preparing Students for THEIR Future*
- Dantes. N. *Pendidikan Profesi Guru dalam Kaitannya dengan Peningkatan Profesionalisme Guru (Refleksi tentang Struktur Program LPTK)*, Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, 2007
- Dja'ali. 2016. *Kurikulum dan Sistem Pembelajaran di LPTK*, Bahan Presentasi dalam KONASPI
- Greenstein, L. 2012. *Assessing 21st Century Skill*. California: SAGE Publication Ltd.
- Kang, M., Kim, M., Kim, B., & You, H. 2012. *Developing an Instrumen to Measure 21 st Century Skills for Elementary Student*. [www. icome.bnu.edu.cn.com](http://www.icome.bnu.edu.cn.com). Diakses Tanggal 17 Februari 2014.
- Liliasari. 2012. Pengembangan Alat Ukur Berpikir Kritis pada Konsep Termokimia untuk Siswa SMA Peringkat Atas dan Menengah. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, ISSN 2089-4392, Volume 1 Nomor 1 April 2012.
- NCREL & Metiri Group. 2003. *En Gauge 21st Century Skills: Literacy in The Digital age*. [http:// www.ncrel.org/engauge/skills/skills.htm](http://www.ncrel.org/engauge/skills/skills.htm).
- Nuh, Muhammad. 2013. *Menyiapkan Guru Masa Depan*, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Partnership for 21st century Skill.2002. *Learning for the 21st century*. A Report and MILE Guide for 21st century skills. [www. 21stcenturyskills.org.P21. Report.pdf](http://www.21stcenturyskills.org.P21.Report.pdf). Diakses 13 Januari 2013.
- Partnership for 21st century Skill. 2009. *21st Century Skills Map*. <http://science.nsta.org/ps/Final21stCenturyMapScience.pdf>. Diakses 13 Januari 2013
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
- Raka Joni, T. 2006. *Revitalisasi Pendidikan Profesional Guru*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
- Rotherham, A. J., & Willingham, D. 2009. 21st Century Skills: The Challenges Ahead. *Educational Leadership*. Volume 67 Number 1, 16-21.
- Surapranata. Sumarna. 2016. *Standar Mutu dan Profesionalisme Guru*, Bahan Presentasi KONASPI
- Suyanto dan Asep Jihad. 2013. *Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global*, Jakarta, Penerbit Erlangga
- Trisdiono, H. 2013. Strategi Pembelajaran Abad 21. *Artikel*. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Prov. D.I. Yogyakarta.
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional
- USAID Prioritas. 2017. *Supply and Demand Guru Madrasah : Sisi Lain dari Reformasi LPTK*, Bahan Presentasi FGD antara Tim Reformasi LPTK PTKI Kementerian Agama dengan Tim USAID Prioritas.